RENCANA STRATEGIS
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2016
2020

Technopreneurship
Entrepreneurship dan
Industri Kreatif
Pembangunan Daerah dan Desa
Pengentasan Kemiskinan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

LEMBAR PENGESAHAN

1. Nama Perguruan Tinggi	:	**Universitas Wijaya Putra**
2. Alamat Perguruan Tinggi	:	Jl. Raya Benowo No. 1-3 Surabaya
3. Penanggungjawab	:	**Budi Endarto, SH., M.Hum.**
4. Ketua Pelaksana		
Nama	:	**Dr. Nugroho Mardi Wibowo, SE., M.Si.**
Jabatan	:	Ketua LPPM Universitas Wijaya Putra
Telepon Kantor	:	(031) 7404404
Telepon Seluler	:	081 839 2676
Fax	:	(031) 7404405
e-mail	:	lppm@uwp.ac.id
5. Nama Yayasan	:	**Yayasan Insan Indonesia Mandiri**
6. Alamat	:	Jl. Ubi VIII/3 Jagir, Wonokromo, Surabaya

Surabaya, 15 September 2016
Penanggungjawab,
Rektor,

UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA

Budi Endarto, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat dan hidayah Beliau penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) Universitas Wijaya Putra (UWP) tahun 2016 – 2020 dapat diselesaikan dengan lancar. Bahwa RENSTRA PPM UWP 2016-2020 ini disusun dengan mendasarkan pada rekam jejak penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan oleh sivitas akademika UWP, visi, misi dan tujuan UWP, serta perkembangan isu-isu strategis permasalahan permasalahan publik yang berkembang baik pada skala regional, nsional maupun internasional, merujuk pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021.

RENSTRA PPM ini diharapkan dan diarahkan untuk dapat menjadi payung bagi penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) oleh seluruh sivitas akademika dan unit kerja terkait di lingkungan UWP selama kurun waktu 2016-2020. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, bahwa salah satu persyaratan desentralisasi kepada perguruan tinggi dalam penyelenggaraan PPM adalah ketersediaan rekam jejak dan payung PPM bagi para Program Studi, Pusat Studi, Pusat Kajian maupun laboratorium di perguruan tinggi. Dalam RENSTRA PPM ini ditetapkan bidang-bidang unggulan yang akan menjadi payung utama PPM di UWP, yaitu : Pembangunan daerah dan ekonomi lokal; Pengembangan *enterpreneurship* dan industri kreatif; Pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan mitigasi dan rehabilitasi pasca bencana; Penerapan teknologi tepat guna. Pada masing-masing bidang tersebut lebih lanjut dikembangkan tema-tema unggulan PPM.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor, para Bapak dan Ibu Wakil Rektor, Bapak dan Ibu para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana, Bapak dan Ibu para Ketua Program Studi, Bapak Kepala Badan Penjaminan Mutu, dan semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penyelesaian RENSTRA PPM ini. Semoga RENSTRA PPM UWP 2016-2020 ini benar-benar dapat memberikan panduan dan arah bagi penyelenggaraan PPM yang berkualitas.

Surabaya, September 2016

Ketua LPPM,

ttd

Dr. Nugroho Mardi Wibowo, SE., M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Alur dan Dasar Penyusunan RENSTRA PPM 2

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran 4

1.3.1. Maksud 4

1.3.2. Tujuan 4

1.3.3. Sasaran 4

1.4. Ruang Lingkup 5

BAB 2 LANDASAN PENGEMBANGAN PPM

2.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Wijaya Putra 6

2.1.1. Visi Universitas Wijaya Putra 6

2.1.2. Misi Universitas Wijaya Putra 6

2.1.3 Tujuan Universitas Wijaya Putra 6

2.1.4. Misi PPM Universitas Wijaya Putra 7

2.2. Analisis Kondisi 7

2.2.1. Ketersediaan Sumber Daya 7

2.2.1.1. Tenaga Dosen 7

2.2.1.2. Modal Dasar 8

2.2.1.3. Kelembagaan 9

2.2.1.4. Prasarana 10

2.2.2. Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat 11

2.2.3. Kerjasama Penyelenggaraan PPM 12

2.2.3. Kinerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa 12

2.3. Isu-isu Strategis dan RPJM Rujukan 13

2.3.1. Isu Global 14

2.3.1.1. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 14

2.3.1.2. Sustainable Development Goals (SDGs) 14
2.3.2. RPJM Nasional dan RPJM Daerah 16
2.3.2.1. RPJM Nasional 2015-2019 16
2.3.2.2. RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 18
2.3.2.3. RPJM Daerah Kota Surabaya 2016-2021 20
2.4. Analisis SWOT 23
2.4.1. *Strenght* (Kekuatan) 23
2.4.2. *Weakness* (Kelemahan) 24
2.4.3. *Opportunity* (Peluang) 24
2.4.4. *Threat* (Tantangan) 24
BAB 3 GARIS-GARIS BESAR RENSTRA PPM
3.1. Tujuan dan Sasaran 26
3.2. Kebijakan Strategi dan Pengembangan Unit Kerja 28
3.2.1. Kebijakan Strategis 28
3.2.2. Pengembangan Unit Kerja 28
3.3. Bidang Unggulan dan Peta Strategis PPM UWP 29
3.3.1. Bidang Unggulan PPM UWP 29
3.3.2. Peta Strategis PPM 30
BAB 4 PROGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA
4.1. Program dan Kegiatan PPM 32
4.2. Tema Unggulam PPM 37
4.3. Pengukuran Kinerja 40
BAB 5 IMPLEMENTASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI
5.1. Implementasi 45
5.2. Sumber Pembiayaan 46
5.3. Pemantauan dan Evaluasi 49
5.4. Diseminasi Hasil 49
BAB 6 PENUTUP 51

Daftar Referensi 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ruang Lingkup PPM UWP 2016-2020 5

Tabel 2.1 Sebaran Jabatan Fungsional Dosen UWP 2015 7

Tabel 2.2 Kualifikasi Jenjang Pendidikan Dosen UWP 2015 8

Tabel 2.3 Program Studi dan Unit Pengelola 8

Tabel 2.4 Perkembangan Jumlah Judul dan Dana Hibah PM di Universitas Wijaya Putra 2012 – 2015 11

Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Judul dan Dana (Rp.) Hibah PM di Universitas Wijaya Putra Tahun 2013 – 2015 11

Tabel 2.6 Kerjasama Penyelenggaraan PPM 12

Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Mahasiswa Peserta KKM 12

Tabel 2.8 Sebaran Fakultas/Prodi Mahasiswa Peserta KKM 13

Tabel 2.9 Target Sasaran Utama SDGs 15

Tabel 2.10 Trisakti dan Nawa Cita 17

Tabel 2.11 Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2015-2019 18

Tabel 2.12 Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 ... 20

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasara RENSTRA PPM 2016-2020 27

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan PPM UWP 34

Tabel 4.2 Tema Unggulan Bidang *Technopreneurship* 37

Tabel 4.3 Tema Unggulan Bidang *Enterpreneurship* dan Industri Kreatif 37

Tabel 4.4 Tema Unggulan Bidang Pembangunan Daerah dan Desa 38

Tabel 4.5 Tema Unggulan Bidang Pengentasan Kemiskinan 39

Tabel 4.6 Pengukuran Kinerja PPM 40

Tabel 5.1 Rencana Prosentase Sumber Pembiayaan PM 47

Tabel 5.2 Proyeksi Perolehan Hibah PPM s/d 2021 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bidang Unggulan PM UWP Tahun 2016-2020 30
Gambar 3.2 Peta Strategis Pengelolaan PM UWP tahun 2016-2020 31

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tri dharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PM), merupakan kegiatan utama sivitas akademika pada setiap perguruan tinggi. Sebagaimana ketentuan UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, tri dharma perguruan tinggi adalah tugas dan fungsi pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen. Pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi oleh segenap sivitas akademika, khususnya dosen, diarahkan untuk mengembangkan institusi perguruan tinggi dengan meningkatkan kualitas dan daya saing secara keseluruhan. Bahwa keberadaan perguruan tinggi, selain menghasilkan lulusan dan *product of knowledge* (berupa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni = ipteks), juga dituntut untuk mampu mengabdikan *product of knowledge* tersebut untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya.

Diterapkannya desentralisasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM), oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2012, pada dasarnya diarahkan untuk menstimuli agar keterlibatan dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat, dan sekaligus meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam mengelola penelitian dan PPM. Yang kemudian peningkatan tersebut juga akan mengarah pada kualitas dan kebaruan (*updating*) penelitian dan PPM, beserta kemanfaatannya.

Guna memberikan arah pengembangan dan pelaksanaan serta pencapaian peningkatan kualitas dan kuantitas PPM di lingkungan Universitas Wijaya Putra, dirumuskan arah kebijakan pengelolaan PPM yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2016 - 2021. RENSTRA PPM merupakan dokumen kebijakan pengelolaan PPM yang akan menjadi acuan semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pelaksanaan PPM di lingkungan Universitas Wijaya Putra, (di dalamnya termasuk Kuliah

Kerja Nyata=KKN oleh mahasiswa). Pengembangan dan pelaksanaan PPM di lingkungan Universitas Wijaya Putra yang dilaksanakan para dosen, khususnya yang pendanaannya dari sumber internal baik mandiri maupun kelompok, diarahkan untuk dapat saling terkait dan terintegrasi dengan pelaksanaan KKN mahasiswa. Selain itu peyelenggaraan dan pelaksanaan PPM (di dalamnya termasuk KKN) diintegrasikan dengan penelitian, dimana pelaksanaan PPM berbasis pada/bertolak dari temuan-temuan hasil penelitian penelitian, dan sebaliknya pengembangan penelitian juga berpijak pada permasalahan-permasalahan yang diperoleh dari pelaksanaan PPM. Dengan demikian ke depan penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian dan PPM akan lebih berkualitas, efektif dan efisien. Diharapkan ke depan akan semakin terbangun atmosfir kampus yang kondusif, dan semakin kuatnya kerjasama internal UWP (LPPM dengan fakultas, program studi dan pusat-pusat studi maupun labolatorium) serta kerjasama eksternal (UWP dengan instansi pemerintah maupun swasta) untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan PPM.

1.2. ALUR DAN DASAR PENYUSUNAN RENSTRA PPM

Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) merupakan aktualisasi bagaimana perguruan tinggi mengabdikan *product of knowledge* yang dimiliki untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia pada khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya. Karena itu penyelenggaraan dan pelaksanaan PPM diarahkan untuk mendukung keberhasilan dan dapat bersinergi dengan program pembangunan yang dirancang dan dijalankan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berpijak dari pemikiran tersebut, dalam penyusunan RENSTRA PPM Universitas Wijaya Putra selain mendasarkan pada kebijakan Pemerintah/peraturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kebijakan internal di lingkungan Universitas Wijaya Putra, juga mengacu kepada isu-isu strategis pada tingkat internasional, nasional dan kewilayahan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik tingkat nasional maupun daerah.

Adapun yang menjadi acuan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Rencana Strategis Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan program prioritas Nawacita
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021
8. Statuta Universitas Wijaya Putra Tahun 2014-2019
9. Rencana Strategis Universitas Wijaya Putra Tahun 2014-2019
10. Rencana Induk Penelitian Universitas Wijaya Putra Tahun 2015 - 2019
11. Hasil *forum group discussion* antara LPPM dengan pimpinan UWP, para pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana dan para ketua program studi S1 dan S2.

Disamping itu, agar RENSTRA PPM ini dapat sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang tengah berkembang, penyusunannya juga dengan mengacu dan memperhatikan berbagai isu-isu pembangunan yang berkembang, baik pada skala global, nasional maupun kewilayahan, sebagai berikut:

1. Isu-isu global pada skala internasional yang mempengaruhi program pembangunan tingkat nasional maupun daerah, meliputi: (a) Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang merupakan bentuk penerapan pasar bebas antar negara di Asia Tenggara; dan (b) *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diberlakukan tahun 2016-2031 untuk meneruskan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berkahir pada tahun 2015
2. Isu-isu dalam pembangunan nasional, diantaranya adalah : (a) Ekonomi (yang mencakup pula pada swasembada lima komoditas: beras, jagung, gula, kedelai dan sapi); (b) Pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (c) Politik, hukum, pertahanan dan keamanan; (d) Kesejahteraan rakyat; (e) Kewilayahan (dengan perhatian pada pembangunan desa perbatasan, dan membangun desa mandiri); dan (f) Pengembangan Kelautan, berkaitan dengan program poros maritim.
3. Isu-isu strategis kewilayahan dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah: (a) tingginya ketergantungan pada sektor insdustri pengolahan;

(b) kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (c) rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah; (d) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM); (e) terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat; dan (f) rendahnya kualitas belanja daerah.

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) tahun 2016-2020 ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi semua pihak di lingkungan Universitas Wijaya Putra dalam mengembangkan dan melaksanaan PPM (termasuk Kuliah Kerja Nyata = KKN oleh mahasiswa) sebagai bentuk penerapan Ipteks yang terintegrasi dan saling terkait dengan penelitian dan pengajaran, agar berdaya guna dan berhasil guna.

1.3.2. Tujuan

Yang menjadi tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) tahun 2016-2020 ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan daya saing Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, khususnya penerapan Ipteks melalui PPM dan KKN.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPM dan KKN yang dapat membantu penyelesaian permasalahan masyarakat secara nyata,
3. Mewujudkan integrasi penyelenggaraan dan pelaksanaan PPM, KKN dan penelitian.
4. Meningkatkan keberadaan Universitas Wijaya Putra di tengah-tengah masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Universitas Wijaya Putra.

1.3.3. Sasaran

Dengan telah tersusunya Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) tahun 2016-2020 ini, sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas PPM di Universitas Wijaya Putra tiap tahunnya
3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam PPM yang dilaksanakan dosen

4. Meningkatkan kualitas KKN reguler, kualitas dan kuantitas KKN PPM dengan sumber pembiayaan hibah Kemeristekdikti
5. Tumbuh-kembangnya pelaksanaan PPM dan KKN dengan sumber pembiayaan dari sponsor selain program hibah Kemeristekdikti
6. Meningkatnya publikasi ilmiah dan perolehan HaKI dari luaran PPM dan KKN
7. Terintegrasinya pelaksanaan PPM dan KKN dengan penelitian dan PPM dengan pangajaran (penulisan bahan/buku ajar berbasis *work paper* luaran PPM)
8. Menjadikan hasil-hasil penelitian dan PPM yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat.

1.4. RUANG LINGKUP

Yang menjadi cakupan dari ruang lingkup PPM yang diatur dalam RENSTRA PPM Universitas Wijaya Putra tahun 2016-2020 ini meliputi aspek dan program PPM sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. : Ruang Lingkup PPM UWP 2016-2020

No.	Aspek Pengelompokan	Jenis Program PPM/KKN
1.	Rumpun Keilmuan	Lintas disiplin ilmu yang ada di Universitas Wijaya Putra, dan/atau dengan perguruan tinggi (PT) lain yang manjadi mitra penyelenggaraan PPM
2.	Katagori (Skim) PPM Dosen	▪ Unggulan ▪ Reguler
3.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	✓ KKN PPM ✓ KKN Reguler
4.	Durasi Waktu	▪ Mono Tahun ▪ Multi Tahun
5.	Penyelenggaraan	✓ Mandiri UWP ✓ Kerjasama dengan PTN/PTS lain ✓ Kerjasama dengan Instansi Pemeritah (Pusat/ Daerah) ✓ Kerjasama dengan Instansi Swasta (korporasi) melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ✓ Kerjasama dengan kelompok masyarakat
6.	Sumber Pembiayaan	▪ Pembiayaan Internal UWP ▪ Pembiyaan Program Hibah Dikti ▪ Konsorsium (kerjasama) UWP dengan Mitra (PT lain, Instansi Pemerintah, Swasta (CSR), dan masyarakat) ▪ Sponsor lainnya yang tidakmengikat

BAB 2 LANDASAN PENGEMBANGAN PPM

2.1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Penyusunan Rencana Stategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) tahun 2016-2020 berdasar pada visi dan misi Universitas Wijaya Putra sebagaimana yang tertuang dalam statuta Universitas Wijaya Putra tahun 2015.

2.1.1. Visi Universitas Wijaya Putra

"menjadi Perguruan Tinggi Unggul Berbasis Nilai-nilai Kewirausahaan Pada Tahun 2030"

2.1.2. Misi Universitas Wijaya Putra,

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
2. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah yang unggul dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkeunggulan dan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan berbasis nilai-nilai kewirausahaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik (GUG) berbasis nilai-nilai kewirausahaan.

2.1.3. Tujuan Universitas Wijaya Putra

1. Mencetak lulusan berkarakter wirausaha dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan bidangnya serta responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Mendesiminasikan hasil penelitian untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Memberdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.1.4 Misi PPM Universitas Wijaya Putra

1. Menyelenggarakan PPM berbasis hasil penelitian untuk mendukung keberhasilan program pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, pada tingkat lokal maupun nasional.
2. Menyelenggarakan PPM yang mampu menumbuh kembangkan *enterprenurship*, penerapan teknologi tepat guna dan industri kreatif.
3. Menyelenggarakan PPM yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat/ kelompok sasaran guna menumbuh kembangkan kapasistasnya agar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi.
4. Menggalang kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas PPM dan pembiayaannya

2.2. ANALISIS KONDISI

2.2.1. Ketersediaan Sumberdaya

2.2.1.1. Tenaga Dosen

Sampai dengan tahun 2015, jumlah tenaga dosen di Universitas Wijaya Putra secara keseluruhan 151 orang, dengan kualifikasi akademik sebagian besar Strata 2 dan Strata 3, dengan jabatan fungsional Asisten Ahli sampai dengan Guru besar. Dari 151 orang dosen tersebut yang sudah tersertifikasi profesi dosen sebanyak 57 orang (37%).

Tabel 2.1 : Sebaran Jabatan Fungsional Dosen UWP 2015

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Status
1.	Guru Besar	3 orang	Aktif
2.	Lektor Kepala	22 orang	Aktif
3.	Lektor	21 orang	Aktif
4.	Asisten Ahli	37 orang	Aktif
5.	Tenaga Pengajar (belum memiliki jabatan fungsional)	58 orang	Aktif
Jumlah Keseluruhan		151 orang	

Tabel 2.2 : Kualifikasi Jenjang Pendidikan Dosen UWP 2015

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Status
1.	Strata 3 (Dorktoral)	25 orang	Aktif
2.	Strata 2 (Magister)	116 orang	Aktif
3.	Strata 1 (Sarjana)	10 orang	Aktif
Jumlah Keseluruhan		151 orang	

2.2.1.2. Modal Dasar

Kepemilikan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan modal dasar Universitas Wijaya Putra untuk pengembangan dan penyelenggaraaan tri dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Modal dasar iptek adalah portofolio fakultas dan program studi serta lembaga-lembaga, pusat studi dan unit bisnis berbasis iptek yang dimiliki Universitas Wijaya Putra. Pada aspek modal keilmuan Universitas Wijaya Putra tercermin dari/sesuai dengan rumpun keilmuan program studi strata 1 dan strata 2 yang dikelola melaui fakultas-fakultas dan program pascasarjana sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Program Studi dan Unit Pengelola

Program	Pengelola	Program Studi
Strata 1	Fakultas Ekonomi	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
		2. Manajemen
		3. Akuntansi
	Fakultas Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis)
	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi Negara
	Fakultas Hukum	Ilmu Hukum
	Fakultas Teknik	1. Teknik Mesin
		2. Teknik Industri
		3. Teknik Informastika
	Fakultas Bahasa dan Sastra	Sastra Inggris
	Fakultas Psikologi	Psikologi
Strata 2	Program Pascasarjana	1. Magister Manajemen
		2. Magister Administrasi Publik
		3. Magister Ilmu Hukum

2.2.1.3. Kelembagaan

Susunan struktur organisasi Universitas Wijaya Putra untuk mendukung dan mencerminkan tata kerja dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Sesuai dengan Statuta tahun 2014-2019 susunan struktur organisasi Universitas Wijaya Putra terdiri dari:

1. Dewan Penyantun;
2. Pimpinan Universitas;
3. Senat Universitas;
4. Pelaksana akademik, meliputi:
   a. Fakultas-Fakultas
   b. Program Pascasarjana
   c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Biro-biro Pelaksana Administrasi, meliputi:
   a. Biro Administrasi Akademik
   b. Biro Administrasi Kemahasiswaan
   c. Biro Keuangan
   d. Biro Kepegawaian
   e. Biro Sarana dan Prasarana
   f. Biro Hubungan Masyarakat
6. Unsur Penunjang Unit Pelaksana Teknis, meliputi:
   a. UPT Perpustakaan
   b. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi
   c. UPT Pusat Pengembangan Karier
7. Badan Penjaminan Mutu.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur dalam organisasi Universitas Wijaya Putra tersebut, secara lebih detil diatur dan diperjelas dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Wijaya Putra tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wijaya Putra Tahun 2015.

Guna mendukung penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi, sampai saat ini UWP telah memiliki 7 (tujuh) lembaga penunjang. Yang mana keberadaan dan pengelolaannya berkaitan dengan rumpun disiplin keilmuan dan teknologi sebagaimana tercermin dari program studi yang dikelola UWP. Adapun lembaga-lembaga penunjang yang dimaksud terdiri dari:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. IbIKK Teknologi Tepat Guna dan Alat Peraga
3. Pusat Studi Perilaku Manajerial
4. IbIKK Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Inggris
5. IbIKK Telor Asin Rendah Kolesterol
6. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
7. Laboratorium pada masing-masing fakultas/program studi untuk keperluan penelitian, praktikum mahasiswa dan implementasi program pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga-lembaga penunjang tersebut telah berperan aktif dan keberadaannya menjadi semakin penting dalam rangka mewadahi dan mendukung untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PPM dosen dan KKN, sesuai dengan kekhususan bidang masing-masing lembaga.

2.2.1.4. Prasarana

Fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur fisik Universitas Wijaya Putra, tersebar pada 3 kampus yang dimiliki, yaitu:

1. Kampus I, merupakan kampus induk, beralamat di Jalan Raya Benowo kelurahan Babat Jerawat Kecamatan Pakal Surabaya. Fasilitas yang ada di kampus I dengan peruntukannya meliputi :
   a. Kator Pusat (Rektorat), beserta biro-biro pelaksana administrasi dan Perpustakaan Pusat dan UPT lainnya
   b. Kantor antor dan Gedung Kuliah semua Fakultas dan Program Studi S-1
   c. Laboratorium semua fakultas dan program studi
   d. Fasilitas Olah Raga dan kegiatan kemahasiswaan
2. Kampus II, beralamat di Jalan Raya Kramat Wiyung kelurahan Jajar Tunggal Kecamatan Wiyung Surabaya, yang diperuntukan:
   a. Kantor dan Gedung Kuliah Program Pascasarjana
   b. Kantor pelayanan administrasi
   c. Perpustakaan
3. Kampus III, beralamatkan di Desa Babarsari Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dengan diperuntukan sebagai Kantor dan laboratorium Pusat Studi Perilaku Manajerial

2.2.2. Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM)

Kinerja PPM Universitas Wijaya Putra telah berlangsung dengan baik dan mengalami peningkatan yang signifikan, terutama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terkahir. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur perkembangan kinerja PPM adalah perolehan PPM program hibah Dikti, baik dari sisi jumlah judul, difersifikasi skim dan jumlah dana yang dihibahkan. Peningkatan jumlah judul dan total dana hibah PPM dipaparkan pada tabel 2.4 di bawah, dimana dari 2 judul dengan dana hibah hanya Rp. 140 juta pada tahun 2012, bertambah menjadi 9 judul pada tahun 2013 dengan dana hibah sebesar Rp. 512,5 juta, dan pada tahun 2015 sebanyak 15 judul dengan dana hibah menjapai Rp. 1 milyar lebih.

Tabel 2.4 : Perkembangan Jumlah Judul dan Dana Hibah PPM di Universitas Wijaya Putra 2012 - 2015

Tahun	2012	2013	2014	2015
∑ Judul	2	9	13	15
Dana Hibah (Rp.)	140.000.000	512.500.000	798.500.000	1.093.000.000

Pada aspek sebaran skim, PPM di Universitas Wijaya Putra masih didominasi program hibah mono tahun, yakni IbM. Namun demikian dalam perkembangannya sudah mulai terdapat pegeseran ke arah program hibah PPM multi tahun, yakni pertambahan jumlah judul skim IbIKK menjadi 4 judul, IbPE dan IbW masing masing 1 judul pada tahun 2015. Perkembangan jumlah judul PPM dan perolehan dana hibah masing-masing skim PPM sebagaimana data dalam tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.5 : Perkembangan Jumlah Judul dan Dana (Rp.) Hibah PPM di Universitas Wijaya Putra Tahun 2013 - 2015

Skema PPM	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah
IbM	7	312.500.000	10	448.500.000	9	353.000.000
IbK	1	100.000.000	1	100.000.000	--	--
IbPE	--	--	--	--	1	100.000.000
IbIKK	1	100.000.000	2	250.000.000	4	550.000.000
IbW	--	--	--	--	1	90.000.000
Jumlah	9	512.500.000	13	798.500.000	15	1.093.000.000

2.2.3. Kerjasama Penyelenggaraan PPM

Kerjasama dengan instansi lain dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) yang pernah dan tengah diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Putra (UWP) adalah :

Tabel 2.6 : Kerjasama Penyelenggaraan PPM

Intansi Mitra	Bidang Kerjasama	Tahun
P.T. Jasa Marga (Persero) Tbk.	▪ Pemberdayaan UMKM ▪ Survey kepuasan pelanggan	2007 - 2016
P.T. Pegadaian (Persero)	Pengembangan SDM	2008 - 2016

2.2.4. Kinerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh mahasiswa dilaksanakan secara reguler setiap tahun pada semester genap, sebagai bagian dari kegiatan kurikuler yang terstruktur dalam kurikulum setiap program studi dan merupakan mata kuliah wajib. Lokasi pelaksanaan KKN diprioritaskan pada kawasan sekitar kampus, baik wilayah kota Surabaya maupun wilayah Kabupaten Gresik, yang diarahkan untuk menjadi kawasan kelurahan/desa binaan Universitas Wijaya Putra.

Tabel 2.7 : Perkembangan Jumlah Mahasiswa Peserta KKN

Tahun	Jumlah Peserta	Lokasi Sasaran KKN
2012	155 mhs	Kecamatan Benowo Kota Surabaya
2013	260 mhs	Kecamatan Pakal Kota Surabaya
2014	268 mhs	Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik
2015	342 mhs	Kecamatan Pakal dan Kecamatan Benowo Kota Surabaya

Perkembangan jumlah mahasiswa peserta KKN terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa Universitas Wijaya Putra. Sebaran keterlibatan mahasiswa dari semua program studi yang ada, menjadikan pendekatan dan upaya penyelesaian masalah kelompok sasaran dengan lintas disiplin ilmu secara terpadu. Hal tersebut juga tercermin dari pengorganisasian kelompok /tim kerja peserta KKN. Data perkembangan peserta KKN dan sebaran mahasiswa peserta KKN dari asal program studi, dalam tabel berikut :

Tabel 2.8 : Sebaran Fakultas/Prodi Mahasiswa Peserta KKN

Fakultas / Program Studi		2012		2013		2014		2015	
		L	P	L	P	L	P	L	P
F E	Ilmu Ekonomi	--	--	--	--	--	--	4	2
	Manajemen	33	9	46	26	31	40	62	35
	Akuntansi	17	32	15	49	17	70	20	86
FP.	Agrobisnis	4	--	9	--	13	--	11	2
FISIP	Ilmu Adm. Negara	4	1	21	5	14	7	17	7
FH	Ilmu Hukum	11	4	18	4	11	4	13	6
FT	Teknik Mesin	12	--	20	--	23	1	29	--
	Teknik Industri	9	--	16	1	18	4	28	1
FBS	Sastra Inggris	5	14	10	20	4	11	5	14
Jumlah		95	60	155	105	131	137	189	153
		155		260		268		342	

Pada penyelenggaraan KKN Universitas Wijaya Putra, memiliki tema sentral dan merupakan payung dari tema KKN masing-masing tahun dan program-program operasionalnya, yakni "pemberdayaan *enterpreneurship*" kelompok sasaran. Untuk tema pada tiap-tiap pelaksanaan pada tiap-tiap tahun, disesuaikan dengan permasalahan pada kelompok sasaran dan isu yang berkembang dalam masyarakat, namun tetap mengacu dan merupakan penjabaran dari tema sentral tersebut.

Pengorganisasian peserta KKN dirancang dan dilakukan untuk lebih menjamin agar semua programnya terlaksana dan tujuan tercapai ke arah pemberdayaan *enterprenurship*. Setiap kelompok peserta, ditempatkan pada satu lokasi/wilayah tertentu. Dan pada setiap perserta dibentuk tim kerja utama (selalu ada setiap tahun dan setiap kelompok), yakni: (1) Tim Kerja Manajemen UMKM, (2) Tim Kerja Akuntansi UMKM, (3) Tim Kerja Sosio Preneur, (4) Tim Kerja Desain Produk, (5) Tim Kerja HaKI, dan (6) Tim Kerja Internet Positif. Selain itu, dapat dibentuk tim kerja lain sesuai kebutuhan dan permasalahan di lapangan. Keberadaan tim kerja tersebut mencerminkan program kerja yang ada pada masing-masing kelompok peserta KKN.

2.3. ISU-ISU STRATEGIS DAN RPJM RUJUKAN

Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan PPM di lingkungan UWP diarahkan untuk bersinergi dan mendukung keberhasilan program pembangunan yang dirancang dan dijalankan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya di Jawa Timur). Karena itu dalam penyusunan RENSTRA PPM Universitas Wijaya Putra perlu menyelaraskan dengan dan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) baik tingkat nasional maupun daerah, serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan, sebagai berikut :

2.3.1. Isu Global

2.3.1.1. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai tahun 2015 selain memberi tantangan bagi Indonesia, juga memberikan peluang yang harus dimanfaatkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia. MEA yang merupakan bentuk penerapan pasar bebas antar negara di Asia Tenggara, dengan ciri-ciri utama diantaranya adalah:

- Kawasan ekonomi yang sangat kompetitif
- Memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata
- Daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global
- Basis dan pasar produksi tunggal

Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Untuk itu diperlukan adanya perkuatan kapasitas dan daya saing Indonesia agar dapat mengambil keuntungan besar dalam MEA.

Peran penyelenggaraan PPM memiliki arti penting untuk mendukung perkuatan kapasitas dan daya saing bangsa Indonesia, dengan semakin meningkatkan kapasitas perekonomian dan kewirausahaan berbasis konten lokal namun dengan orientasi dan kapasitas bersaing pada tingkat global.

2.3.1.2. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan program internasional yang digagas Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menjadi acuan bagi pembangunan berbagai negara di dunia diberlakukan tahun 2016-2031 untuk meneruskan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berkahir pada tahun 2015. *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengarahkan agar berbagai program pembangunan di berbagai negara di dunia ini lebih terarah dan berkelanjutan, diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031. SDGs memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:

Tabel 2.9. : Target Sasaran Utama SDGs

No.	Target Sasaran Utama	Deskripsi
1.	Tanpa Kemiskinan	Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia
2.	Tanpa Kelaparan	Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan
3.	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4.	Pendidikan Berkualitas	Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang
5.	Kesetaraan Gender	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan
6.	Air Bersih dan Sanitasi	Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuksemua orang
7.	Energi Bersih dan Terjangkau	Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang
8.	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak	Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang
9.	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
10.	Mengurangi Kesenjangan	Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia
11.	Keberlanjutan Kota dan Komunitas	Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan
12.	Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab	Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi
13.	Aksi Terhadap Iklim	Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14.	Kehidupan Bawah Laut	Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan
15.	Kehidupan di Darat	Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati
16.	Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian	Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan

No.	Target Sasaran Utama	Deskripsi
17.	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

2.3.2. RPJM Nasional dan RPJM Daerah

2.3.2.1. RPJM Nasional 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode tahun 2015-209, sebagai kerangka acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Penyusunan RPJMN Nasional 2015-2019 dilandasi visi Pemerintah Pusat, yaitu :

> "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Dalam RPJMN 2015-2019 memiliki 9 (sembilan) program prioritas, yang merupakan program yang diusung Pemerintah Pusat, dalam konsep "Nawacita", yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa-bangsa Asia lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Dari ke sembilan program prioritas tersebut, diarahkan untuk dapat mencapai "Trisakti", yang meliputi: kedaulatan di bidang politik, kemandirian di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Keterkaitan antara visi Pemerintah, dengan program prioritas (nawacita) dan trisakti dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana dalam tabel berikut di bawah:

TRISAKTI DAN NAWACITA

VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

7 MISI

Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.	Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera	Bangsa berdaya saing	Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional	Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan.

NAWACITA – 9 agenda prioritas

Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN	Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo-kratis dan terpercaya	Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera	Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional	Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	Akan melakuka n revolusi karakter bangsa	Akan memper-teguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama)			BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi)			BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi)		
1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (6) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7)	5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (6)	9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5)	1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan.	5. Membangun pemberdayaa n buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur	10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14. Membangun karakter dan potensi wisata 15. Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional 16. Pengembanga n industri manufaktur	1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa	2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial	3. Akan memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga

2.3.2.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014-2019, terdapat 19 (sembilan belas) tujuan, beserta sasaran masing-masing. Dimana ke 19 tujuan tersebut pada dasarnya mencerminkan program prioritas pembangunan daerah Propinsi Jawa Timur yang hendak dicapai pada tahun 2019, dalam rangka menjawab permasalahan isu-isu strategis kewilayanan dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah:

(a) tingginya ketergantungan pada sektor insdustri pengolahan
(b) kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
(c) rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah
(d) rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM)
(e) terbatasnya mobilitas tabungan masyarakat; dan
(f) rendahnya kualitas belanja daerah.

Adapun ke 19 (sembilan belas) tujuan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur, beserta sasaran masing-masing, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. : Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2015-2019

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja	1) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan penyerapan tenaga kerja 2) Meningkatnya hubungan industial yang harmonis
2. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan	1) Meningkatnya Akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas 2) Meningkatnya kuantitas dan Kualitas pendidikan anak usia dini 3) Meningkatnya Mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 4) Meningkatnya Kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1) Meningkatnya ketersediaan tenaga medis secara merata 2) Menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan 3) Meningkatnyapelayanan kesehatan sesuai Dengan standar pelayanan minimal 4) Meningkatnyakeikutsertaanmasyarakat dalam jaminan kesehatan 5) Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB)
4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan	1) Menurunnya persentase penduduk miskin 2) Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 3) Meningkatnya pengarusutaaan gender dalam pembangunan

Tujuan	Sasaran
5. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	1) Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi 2) Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB) 3) Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan
6. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan)
7. Meningkatnya ketahanan pangan	1) Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat *(food avaibility)* 2) Meningkatnya penyerapan pangan *(food utilization)* 3) Meningkatnya akses pangan (food access)
8. Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri
9. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri	Meningkatnya kontribusi sektor industri
10. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	1) Meningkatnya kunjungan wisata 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas seni budaya lokal
11. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri serta investasi daerah	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah
12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1) Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut dan udara 2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi 3) Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air 4) Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi
13. Meningkatkan kualitas lingkungan, dan pemeliharaan kelestariannya	1) Meningkatnya kawasan hutan yang dikonservasi 2) Meningkatnya sumber mata air terkonservasi 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pengendalian sumber-sumber pencemaran terutama sumber daya air, DAS dan wilayah pesisir serta laut 4) Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
14. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang
15. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan bersih (clean government) serta profesionalisme pelayanan publik	1) Meningkatnyakualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik 2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan 4) Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

Tujuan	Sasaran
	5) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 6) Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas 7) Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
16. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	1) Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan 2) Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama
17. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman dan tertib
18. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (local wisdom)	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
19. Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan	1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM 2) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum

2.3.2.3. RPJM Daerah Kota Surabaya 2016-2021

Pemerintah Kota Surabaya, melalui RPJMD tahun 2016-2021 telah menetapkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tujuan yang ingin dicapai, yang juga mencerminkan program pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu tahun 2016-2021. Adapun deskripsi secara rinci dari ke 27 tujuan dalam RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 termaksud, beserta sasaran masing-masing, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. : Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD Kota Surabaya 2016-2021

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pendidikan	1) Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas 2) pendidikan formal 3) Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas 4) pendidikan nonformal
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1) Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin 2) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak 3) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan 4) Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat 5) Meningkatnya kualitas layanan KB dasar

Tujuan	Sasaran
3. Meningkatkan ketahanan pangan	1) Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan 2) Meningkatkan distribusi pangan
4. Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda	1) Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda 2) dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan 3) Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga 4) di tingkat regional, nasional dan internasional
5. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja untuk mengurangi pengangguran	1) Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja 2) Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis
6. Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1) Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar 2) dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
7. Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif
8. Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak	1) Meningkatkan pemberdayaan perempuan 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah	1) Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, 3) toleransi dan kerukunan antar umat beragama
10. Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan	1) Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2) Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum 3) Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
11. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	1) Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan 3) Meningkatkan kualitas udara dan air
12. Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana	1) Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang 2) antisipatif dan tanggap
13. Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni

Tujuan	Sasaran
14. Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif
15. Meningkatkan upaya konservasi energi	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi
16. Melestarikan budaya lokal	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
17. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
18. Memantapkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan	Mewujudkan wawasan, karakter dan nilai-nilai kebangsaan
19. Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya	1. Peningkatan sistem manajemen city logistik 2. Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegras
20. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan 2) Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
21. Memantapkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien
22. Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif	1) Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa 2) Meningkatkan produktivitas koperasi 3) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian 4) Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan 5) Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif
23. Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan
24. Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)
25. Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
26. Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu	1) Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan 2) Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas 3) Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan
27. Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata	1) Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih 2) Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU 3) Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya

2.4. ANALISIS SWOT

Dalam rangka untuk pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Wijaya Putra, khususnya dalam pelaksanaan dharma Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM), perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap potensi dan konsdisi internal, yang merupakan ***strenght*** (kekuatan) yang harus dimaksimalkan pemanfaatannya dan ***weakness*** (kelemahan) yang harus dibenahi, serta kondisi dan potensi ekternal yang merupakan ***opportunity*** (peluang) yang harus dimanfaatkan dan ***threat*** (tantangan) yang harus dihadapai.

2.4.1. *Strenght* (Kekuatan)

1. Jumlah tenaga dosen sebanyak 151 orang, dengan kualifikasi jenjang akademik stara 3 ada 16% dan starta 2 ada 76%. Difersifikasi bidang keilmuan dan keahlian yang beragam tercermin dari sebaran dosen pada 7 Fakultas dan 14 program studi. Komitmen dan upaya Universitas Wijaya Putra dalam meningkatkan kualitas dosen dengan mengirimkan untuk studi lanjut pada jejang strata 3, diharapkan akan dapat meningkatkan atmosfir kampus serta kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kepercayaan kepada Universitas Wijaya Putra (melalui LPPM dan para dosen pengabdi) untuk mengelola dan melaksanakan PPM program hibah Dikti, yang tercermin dari peningkatan jumlah judul dan dana hibah PPM. Pada tahun 2013 sebanyak 9 judul dengan dana Rp. 512.500.000, pada tahun 2014 sebanyak 13 judul dengan dana Rp. 798.500.000 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 15 judul dengan dana Rp. 1.093.000.000.
3. Diselenggarakannya program *workshop* dan pelatihan penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat secara rutin setiap tahun untuk para dosen di lingkungan Universitas Wijaya Putra
4. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Tematik setiap tahun, dengan tema yang berpusat pada "pengembangan enterpreneurship" yang telah dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan semakin memberdayakan masyarakat kelompok sasaran. Pelaksanaan KKN UWP senantiasa mendapat apresiasi masyarakat sasaran.
5. Kebijakan pimpinan UWP yang terus mendorong dan mengembangkan program strategis untuk semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada

masyarakat. Setiap tahun pimpinan UWP memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para dosen yang berprestasi, termasuk prestasi dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

2.4.2. *Weakness* (Kelemahan)

1. Masih cukup banyak dosen yang belum terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan PPM, selain karena lebih tersibukan pada kegiatan mengajar juga karena kurang tertarik untuk terlibat dalam kegiatan PPM.
2. Masih terbatasnya sumber pendanaan internal untuk penyelenggaraan PPM
3. Masih sedikit kegiatan PPM dosen (baik mandiri atau kemlompok) dengan sumber pendanaan dari internal, yang dilaksanakan terintegrasi dengan pelaksanaan KKN
4. Belum maksimalnya sinergi antar rumpun disiplin ilmu dalam pengembangan kegiatan PPM

2.4.3. *Opportunity* (Peluang)

1. Ketersediaan sumber pendanaan dari program hibah kementerian Ristekdikti dalam berbagai skema, yang disertai dengan kebijakan desentralisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Ketersediaan sumber pendanaan lainnya dan kerjasama dengan intansi Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Besarnya peluang kerjasama dengan korporasi melalui program *corporate social responsibility* (CSR) dan dari badan-badan swasta lainnya guna mendukung pelaksanaan PPM dosen dan KKN
4. Masih banyak bidang dan permasalahan sosial (yang merupakan obyek kegiatan PPM dosen dan KKN) yang belum tergarap

2.4.4. *Threat* (Tantangan)

1. Semakin ketatnya persaingan antar pengabdi dari berbagai perguruan tinggi dalam memperebutkan dana hibah PPM dan KKN dari program hibah Kemenristekdikti
2. Semakin banyak dan berkembangya permasalahan masyarakat yang membutuhkan bantuan penyelesaian melalui PPM dan KKN
3. Adanya regulasi Pemerintah (Daerah) yang membatasi akses kerjasama perguruan tinggi swasta (PTS) dengan instansi Pemerintah guna penyelenggaraan dan pendanaan kegiatan PPM dan KKN

4. Masih adanya korporasi yang enggan membangun kerjasama pemanfaatan CSR dengan PTS di luar kabupaten/kota wilayah kedudukannya untuk pendanaan PPM dosen dan KKN.

Dengan mengoptimalkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan diimbangi dengan upaya memanfaatkan berbagai peluang yang ada, diharapkan akan dapat memecahkan permasalahan yang bertolak kelemahan-kelemahan yang ada. Pada dasarnya penyelenggaraan *workshop* dan pelatihan penyusunan proposal, apresiasi dan penghargaan pimpinan kepada dosen berprestasi secara rutin setiap tahun, serta sosialisasi peningkatan perolehan hibah PPM diarahkan untuk semakin meningkatkan motivasi para dosen agar terlibat secara aktif dalam pelaksanaan dharma PPM. Diharapkan secara bertahap dapat semakin meningkatkan jumlah dosen dalam kegiatan PPM sampai semuanya terlibat aktif.

Selain mengupayakan peningkatan perolehan hibah, baik dari jumlah skema maupun jumlah pendanaan, melalui peningkatan kualitas proposal dan diversifikasi skema, diupayakan pula menggalang dan meningkatan jalinan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi Pemerintah dan korporasi (dalam rangka pemanfaatan dana *Corporate Social Rensponsibility* = CSR) diarahkan untuk mengatasi masalah keterbatasan pembiyaan. Guna meningkatkan jalinan kerja sama kemitraan yang dimaksud, selain mengintensifkan komunikasi juga dengan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan semua *stakeholder*. Kepercayaan tersebut akan dapat dibangun dan ditingkatkan melalui pelaksanaan PPM dosen dan KKN yang makin berkualitas dan mampu secara nyata memberikan sumbangan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat dengan semakin memberdayakan masyarakat dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.

BAB 3 GARIS-GARIS BESAR RENSTRA PPM

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana telah dipaparkan dalam Bab I, bahwa yang menjadi tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) Universitas Wijaya Putra tahun 2016-2020 ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan daya saing Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, khususnya penerapan Ipteks melalui PPM dan KKN.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPM dan KKN yang dapat membantu penyelesaian permasalahan masyarakat secara nyata,
3. Mewujudkan integrasi penyelenggaraan dan pelaksanaan PPM, KKN dan penelitian.
4. Meningkatkan keberadaan Universitas Wijaya Putra di tengah-tengah masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Universitas Wijaya Putra.

Sesuai dengan tujuan tersebut, sasaran yang hendak dicapai melalui Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) UWP tahun 2016-2020 ini, adalah :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas PPM di Universitas Wijaya Putra tiap tahunnya
3. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam PPM yang dilaksanakan dosen
4. Meningkatkan kualitas KKN reguler, kualitas dan kuantitas KKN PPM dengan sumber pembiayaan hibah Kemeristekdikti
5. Tumbuh-kembangnya pelaksanaan PPM dan KKN dengan sumber pembiayaan dari sponsor selain program hibah Kemeristekdikti
6. Meningkatnya publikasi ilmiah dan perolehan HaKI dari luaran PPM dan KKN

7. Terintegrasinya pelaksanaan PPM dan KKN dengan penelitian dan PPM dengan pangajaran (penulisan bahan/buku ajar berbasis *work paper* luaran PPM)
8. Menjadikan hasil-hasil penelitian dan PPM yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat.

Adapun keterkaitan antara keempat tujuan dengan kedelapan sasara tersebut, sebagaimana paparan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. : Tujuan dan Sasara RENSTRA PPM 2016-2020

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kapasitas lembaga dan daya saing Universitas Wijaya Putra dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, khususnya penerapan Ipteks melalui PPM dan KKN	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas PPM dan KKN yang dapat membantu penyelesaian permasalahan masyarakat secara nyata	• Peningkatan kuantitas dan kualitas PPM di Universitas Wijaya Putra tiap tahunnya • Meningkatkan kualitas KKN reguler, kualitas dan kuantitas KKN PPM dengan sumber pembiayaan hibah Kemeristekdikti
3. Mewujudkan integrasi penyeleng-garaan dan pelaksanaan PPM, KKN dan penelitian	• Terintegrasinya pelaksanaan PPM dan KKN dengan penelitian dan PPM dengan pangajaran (penulisan bahan/buku ajar berbasis *work paper* luaran PPM) • Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam PPM yang dilaksanakan dosen • Menjadikan hasil-hasil penelitian dan PPM yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat
4. Meningkatkan keberadaan Universitas Wijaya Putra di tengah-tengah masya-rakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Universitas Wijaya Putra	• Tumbuh-kembangnya pelaksanaan PPM dan KKN dengan sumber pembiayaan dari sponsor selain program hibah Kemenris-tekdikti • Meningkatnya publikasi ilmiah dan perolehan HaKI dari luaran PPM dan KKN

3.2. KEBIJAKAN STARTEGIS DAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA

3.2.1. Kebijakan Strategis

Guna mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM), serta dengan memperhatikan ruang lingkupnya, maka kebijakan startegis dalam rangka pengembangan PPM Universitas Wijaya Putra, meliputi :

1. Meningkatkan budaya mengabdi kepada masyarakat di kalangan sivitas akademika, dengan memperbanyak keterlibatan mahasiswa dalam PPM dosen dan keterlibatan PPM dosen untuk mendukung pelaksanaan KKN.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program PPM dan publikasi hasil PPM.
3. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UWP dalam mengelola dan melaksanakan PPM.
4. Menigkatkan dan memperkuat jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi lain, instansi Pemerintah dan swasta atau pihak lainnya, dalam rangka pelaksanaana dan pembiayaan PPM.

3.2.2. Pengembangan Unit Kerja

Selanjutnya agar program-program strategis yang dirumuskan sebagaimana tersebut di atas dapat terealisasikan dengan baik, akan dilakukan pengembangan unit kerja yang ditempuh dengan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penguatan kelembangaan, sistem dan tata kelola yang kondusif dan mampu mendukung pengembangan dan pelaksanaan PPM dan KKN.
2. Penguatan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan fasilitas sarana-prasarana untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan PPM dan KKN.
3. Mengembangkan sistem penjaminan mutu PPM dan KKN, melalui penyusunan standar pelaksanaan dan kualitas, monitoring dan evaluasi PPM dan KKN.
4. Meningkatkan kapabilitas dan sinerji dosen untuk menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan PPM dan KKN-PPM (Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat) secara kelompok, terutama lintas disiplin ilmu.
5. Meningkatkan motivasi dosen dan memberikan penghargaan kepada para dosen yang berprestasi dalam penyelengaraan PPM, setidaknya dalam skala regional.
6. Menetapkan reviwer (internal) untuk PPM dosen, serta dosen pembina untuk KKN dan PPM mahasiswa.

7. Pengembangan dan peningkatan jejaring kemitraan dengan pihak-pihak terkait, pada skala lokal maupun nasional, guna memperkuat kerjasama penyelenggaraan dan pelaksanaan PPM dan KKN.

3.3. BIDANG UNGGULAN DAN PETA STARTEGIS PPM UWP

3.3.1. Bidang Unggulan PPM UWP

Penyusunan dan pengembangan bidang-bidang unggulan PPM, yang menjadi payung penyelenggaran PPM dan KKN bertolak pada rencana strategis penelitian UWP, mengingat bahwa pengembangan PPM dan KKN diarahkan untuk terintegrasi dengan penelitian dan berbasis pada hasil-hasil penelitian. Karena penyelenggaraan PPM pada dasarnya untuk mendukung keberhasilan program pembangunan nasional, guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, penyusunan dan pengembangan bidang-bidang unggulan PPM, juga dengan memperhatikan dan merujuk pada isu-isu stargetis yang berkembang, baik skala internasional, nasional dan lokal, serta RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota Surabaya. Selain itu juga dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki dan perkembangan isu-isu strategis di masyarakat. Adapun bidang-bidang unggulan yang menjadi payung PPM dan KKN UWP meliputi :

1. *Enterpreneurship* dan industri kreatif
2. Technopreneurship
3. Pembangunan daerah dan desa
4. Pengentasan kemiskinan

Pada dasarnya ke empat bidang unggulan PPM tersebut bukan saling terpisah, namun ada keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain, dan kesemuanya dalam kerangka *enterpreneurship spirit* sesuai visi Universitas Wijaya Putra, yang divisualisasikan dalam gambar 3.1 di bawah.

Dalam pelaksanaan PPM dan KKN, selain berpayung pada bidang-bidang unggulan di atas, masih dimungkinkan dilaksanakan pada bidang lainnya secara reguler. PPM reguler yang dimaksudkan dapat dilaksanakan secara parsial dengan mengangkat tema kegiatan sesuai dengan isu-isu masalah sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Disamping itu, PPM reguler di luar bidang unggulan, dapat juga

dikembangkan dan dilaksanakan dengan mendasarkan atas kepentingan tertentu atau kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik instansi Pemerintah maupun swasta.

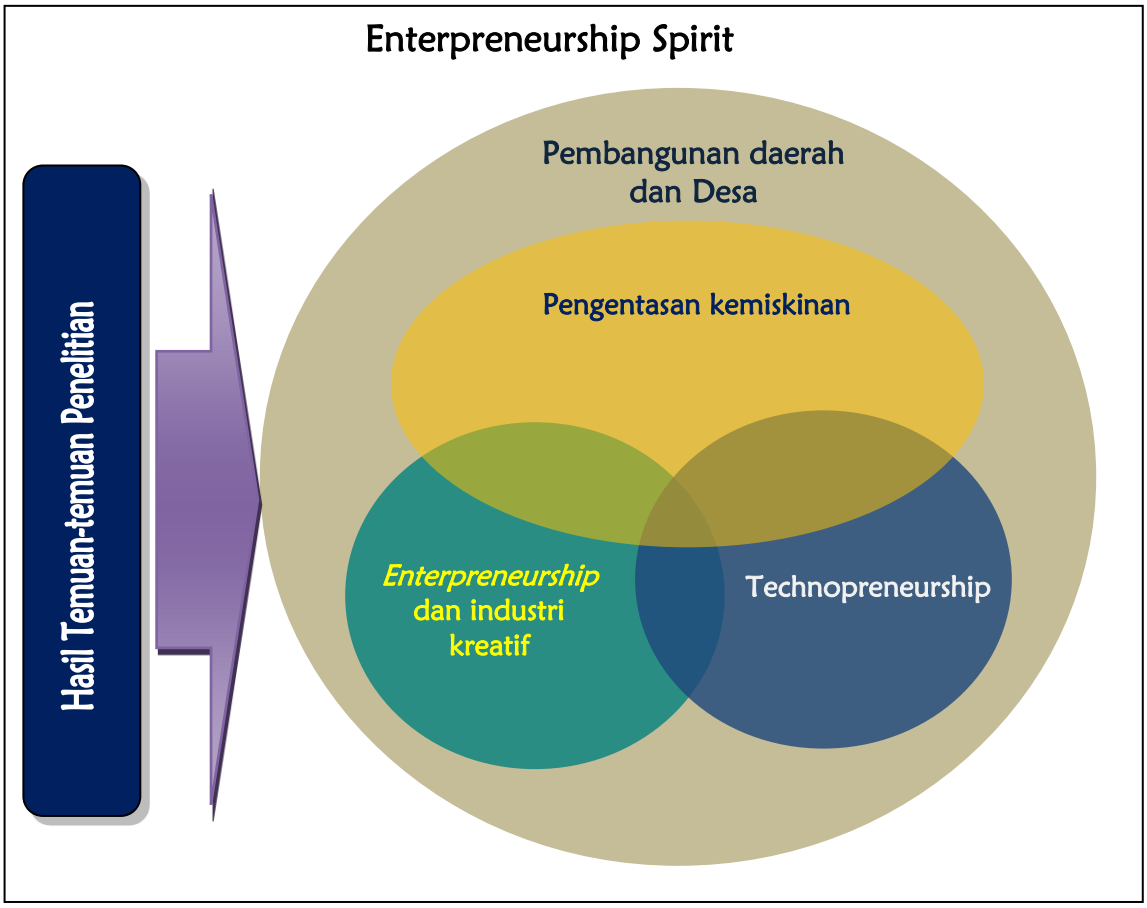

Gambar 3.1 : Bidang Unggulan PPM UWP Tahun 2016-2020

3.3.2. Peta Strategis PPM

Penyelenggaraan kegiatan PPM dan KKN senantiasa meperhatikan dan berpijak pada kekuatan internal (input sumberdaya) serta kebutuhan lingkungan dan sesuai perkembangan permasalahan sosial (imput materi), berdasar dari hasil penelitian, kerjsama dengan pihak terkait maupun isu-isu permasalahan sosial yang berkembang. Selain tema-tema payung yang menjadi bidang-bidang unggulan PPM diakomodir pula tema lain sesuai kebutuhan dan diselaraskan dengan program strategis dalam Rencana Strategis PPM ini. Bertolak dati hal-hal tersebut, selanjutnya pelaksanaan kegiatan PPM dikelompokan pada PPM unggulan dan PPM reguler, serta KKN-PPM dan KKN reguler.

Pengembangan skema program PPM dan KKN dari masing-masing kelompok, akan berkaitan dengan sumber pembiayaan dan durasi pelaskanaan kegiatan. Gambaran petra strategi pengelolaan PPM UWP tahun 2016-2020 sebagaimana dalam gambar 3.2 di bawah ini:

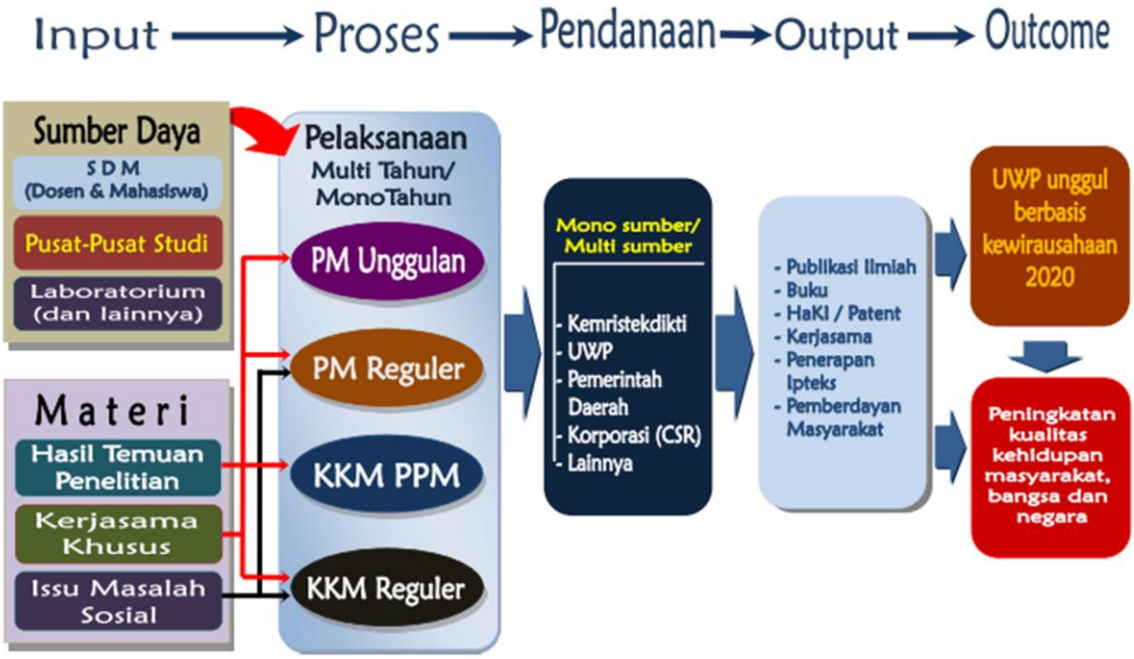

Gambar 3.2 : Peta Strategis Pengelolaan PPM UWP tahun 2016-2021

BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PPM

Pengembangan program dan kegiatan PPM UWP, dengan memperhatikan dan merujuk pada: isu-isu strategis yang berkembang (isu-isu global, nasional dan kewilayahan), program-program prioritas dalam pembangunan (baik dalam RPJMN maupun RPJMD); kapasitas dan ketersediaan sumberdaya dan fasiltas pada Universitas Wijaya Putra, serta hasil dari analisis SWOT yang dilakukan. Program PPM UWP akan mengambil kegiatan dalam rangka untuk mendukung penyelesaian 6 (enam) isu prioritas, meliputi: reformasi birokrasi dan pelayanan publik; pemberdayaan/ kemandirian desa; peningkatan daya saing UMKM dan industri kreatif; pengurangan kemiskinan; ketahanan pangan dan pengelolaan bencana. Pada pada masing-masing isu prioritas tersebut, UWP mengambil beberapa persoalan-persoalan prioritas yang hendak didukung upaya penyelesaiannya melalui progrm PPM UWP, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki, sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, mengacu pada program prioritas dalam RPJMN dan RPJMD, dengan persoalan prioritas:
   a. Penguasaan TIK SDM sektor publik yang masih rendah,
   b. Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik belum banyak dilakukan,
   c. pemanfaatan pelayanan berbasis TIK (e-gov) oleh masyarakat masih rendah, dan
   d. Rendahnya kearsipan berbasis digital, terutama pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Pemberdayaan/kemandirian desa, mengacu pada program prioritas dalam RPJMN dan RPJMD, dengan persoalan prioritas:
   a. Kapabilitas SDM Pemerintah Desa banyak yang masih rendah,
   b. Rendahnya Kapabilitas BPD (secara kelembagaan maupun personal anggotanya) dalam merumuskan Kebijakan Desa, dan
   c. Banyak desa yang sumber keuangannya masih rendah.

3. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan industri kreatif, mengacu pada program prioritas RPJMD Kota Surabaya, dengan persoalan prioritas:
   a. Kapabilitas manajemen pelaku UMKM dalam mengelola usaha masih rendah,
   b. Produktivitas UMKM yang rendah, dalam kualitas maupun kuantitas,
   c. Kualitas desain dan varian produk rendah,
   d. Akses pelaku UMKM ke pasar masih rendah, dan
   e. Belum adanya perlindungan produk UMKM secara baik (masih rendah).
4. Pengurangan kemiskinan, yang mengacu pada isu global, nasional dan daerah (RPJMN dan RPJMD) dengan persoalan prioritas:
   a. Rendahnya skill dan produktivitas SDM keluarga miskin, dan
   b. Rendahnya akses modal dan pasar.
5. Mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, yang mengacu pada isu nasional (RPJMN) dengan masalah prioritas:
   a. Produktivitas pertanian, dan
   b. Ketergatungan petani pada pupuk kimia (belum banyak pemanfaatan pupuk organik).
6. Pengelolaan bencana, yang mengacu pada isu/program prioritas dalam RPJMN dan RPJMD, dengan masalah prioritas:
   a. Rendahnya kemampuan masyarakat daerah rawan bencana dalam melakukan mitigasi bencana,
   b. Kerawanan ketersediaan bahan makan akibat bencana, pada daerah terkena bencana dan sekitarnya, dan
   c. Kurangnya Pemahanan dan kesiapan masyarakat daerah bencana dalam melakukan evakuasi korban bencana.

Adapun program dan kegiatan PPM UWP, dalam rangka mendukung penyelesaian isu prioritas dan persoalan prioritas masing-masing, serta rencana kemitraan dan sumber pembiayaan program kegiatan, dideskripsikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1 : PROGRAM DAN KEGIATAN PPM UWP

Isu G-N-W/ RPJM	Isu Prioritas	Persoalan Prioritas	Solusi Persoalan Prioritas	Program dan Jenis Kegiatan	Kemitraan PT/UMKM/ CSR/PKBL/Pemda	Sumber Dana				
						PT	CSR	Pemda	Dikti	Lain nya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RPJM N/D	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Penguasaan TIK SDM sektor publik rendah	Perkuatan penguasaan TIK SDM sektor publik	Pelatihan TIK untuk SDM administratur publik	PT dan Pemda	√		√		
		Inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik belum banyak dilakukan	Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan TIK	Workshop dan pendampingan dalam pengembangan inovasi pelayanan publik	PT dan Pemda	√		√	√	
		pemanfaatan pelayanan berbasis TIK (e-gov) rendah	Pengenalan dan motivasi pemanfaatan layanan berbasis TIK	Pelatihan pemanfaatan layanan publik berbasis TIK untuk masyarakat	PT dan Pemda	√		√	√	
		Rendahnya kearsipan digital	Pengembangan digitalisasi kearsipan	Workshop dan pendampingan	PT dan Pemda	√		√	√	
RPJM N/D	Pemberdayaan/ kemandirian desa	Kapabilitas SDM PemDes rendah	Perkuatan kapabilitas SDM aparatur Pemdes	• Pelatihan TIK dan digitalisasi kearsipan • Workshop tertib administrasi • Workshop pengumpulan dan pengolahan data monografi	PT dan Pemda	√		√	√	
		Rendahnya Kapabilitas BPD merumuskan Kebijakan Desa	Perkuatan kapabilitas anggota BPD dalam permusan kebijakan Desa	Pelatihan/workshop analisis kebijakan	PT dan Pemda	√		√	√	
		Rendahnya sumber keuangan desa	Pengembangan Badan Usaha milik Desa	• Sosialisasi, advokasi dan pendampingan pembentukan BUMDes • Pelatihan kewirausahaan dan manajerial kepada calon pengelola BUMDes	PT dan Pemda	√		√	√	√

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RPJM D SBY	Daya saing UMKM dan Industri Kreatif	Kapabilitas manajemen rendah	Pengembangan kapabilitas manajemen pelaku UMKM	• Pelatihan manajemen usaha dan akuntansi untuk pelaku UMKM	PT, UMKM, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
		Produktivitas rendah	Pelatihan skill dan pemanfaatan TTG	• Pelatihan peningkatan skill produksi • Pengenalan dan pemanfa-atan TTG untuk proses produksi	PT, UMKM, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
		Kualitas dan varian produk rendah	Pengembangan kualitas dan desain produk	• Pelatihan desain produk • Pelatihan dan pendamping-an kontrol kualitas produk	PT, UMKM, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
		Akses pasar	Pengembangan akses pasar domestik dan global	• Pembentukan sentra pasar • Pelatihan/workshop pengembangan pasar melalui jejaring TIK • Pelatihan dan pendampingan *benchmarking* pasar ekspor	PT, UMKM, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
		Perlindungan hukum atas produk rendah	Pengurusab HaKI	• Sosialisasi manfaat kepe-milikan HaKI (Paten, Merk) • Advokasi dan pendam-pingan pengurusan HaKI	PT, UMKM dan Pemda	√		√	√	
G-N RPJM N/D	Kemiskinan	Rendahnya skill dan produktivitas SDM	Peningkatan skill yang mendukung produktivitas	• Pelatihan ketrampilan kerja • Pelatihan kewirausahaan • Pendampingan pegembangan usaha • Pengembangan usaha alternatif gakin	PT, UMKM, CSR dan Pemda	√	√	√	√	
		Rendahnya akses modal dan pasar	Mengenalkan dan memperkuat akses modal	• Pengembangan model usaha bersama gakin • Pengenalan dan memfasilitasi akses ke fasilitas Pemerintah	PT, UMKM, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengembangan dan perkuatan akes pasar	• Pengembangan inovasi dan desain produk • Memfasilitasi pembentukan menghubungkan ke jejaring pasar	PT, UMKM, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
G/N/W RPJMN/D	Ketahanan Pangan	Produktivitas	Pengembangan budidaya alternatif dan produktivitas	• Penerapan bioteknologi • Penerapan teknologi *hydrophonic* • Pembudayaan *urban farming*	PT, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
		Ketergantungan pada pupuk kimia	Pemanfaatan pupuk organik	• Sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik • Demplot pertanian organik	PT, Pemda	√		√	√	√
RPJMN/D	Pengelolaan bencana	Rendahnya kemampuan mitigasi	Menumbuhkan kapabilitas masyarakat dalam mitigasi bencana	Pelatihan mitigasi bencana	PT, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
		Kerawanan ketersediaan bahan makan akibat bencana	Mengembangkan lumbung pangan di daerah rawan bencana	• Pembentukan dan pelembagaan lumbung pangan • Pelatihan manajemen lumbung pangan • Simulasi distribusi	PT, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√
		Kurangnya Pemahanan dan kesiapan evakuasi masyarakat daerah bencana	Meningkatkan kesiapan evakuasi dan pertolongan	• Pelatihan pemanduan evakuasi kepada tokoh masyarakat dan relawan • Sosialisasi titik kumpul evakuasi • Simulasi evakuasi untuk masyarakat, siswa SD, SMP dan SMA	PT, CSR dan Pemda	√	√	√	√	√

4.2. TEMA UNGGULAN PPM

Bahwa unggulan PPM UWP ditetapkan dalam 4 (empat) bidang, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab 3 di atas, yaitu: (1) *Enterpreneurship* dan industri kreatif, (2) *Technopreneurship*, (3) Pembangunan daerah dan desa, (4) Pengentasan kemiskinan. Guna memberikan arah yang jelas bagi operasionalisasi pelaksanaan kegiatan PPM UWP ke depan, maka dikembangkan tema-tema unggulan PPM dari masing-masing bidang beserta rumpun keilmuan yang terlibat di dalamnya, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Tema Unggulan Bidang *Technopreneurship*

No.	Tema-tema Unggulan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kompetensi Keilmuan
1	2	3
1.	Penerapan TTG untuk pengembangan proses dan kapasistas produksi dan desain produk UMKM	• Agrobisnis • Teknik Mesin • Teknik Industri • Teknik Informatika • Manajemen
2.	Penerapan TTG untuk perkuatan inovasi produk dan proses produksi	
3.	Penerapan konversi dan konservasi energi untuk UMKM dan masyarakat daerah tertinggal	
4.	Penerapan Konservasi air untuk daerah lahan kering	• Psikologi
5.	Pelatihan pemanfaatan internet positif untuk pembelajaran	
6.	Pelatihan pemanfaatan internet positif untuk UMKM	
7.	Penerapan pengembangan *model operation* pada proses produksi industri dan UKM	
8.	Penguatan penggunaan TIK pada pelaku UMKM	
9.	Penerapan bioteknologi dan teknologi *hydrophonic* untuk meningkatkan produk pertanian	
10.	Pembuatan dan penerapan/penggunaan pupuk organik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian	

Tabel 4.3 : Tema Unggulan Bidang *Enterpreneurship* dan Industri Kreatif

No.	Tema-tema Unggulan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kompetensi Keilmuan
1	2	3
1.	Pelatihan dan pembinaan manajemen UMKM dan industri kreatif	• Ilmu Ekonomi • Manajemen • Akuntansi • Ilmu Adm. Publik • Ilmu Hukum • Sastra Inggris
2.	Penguatan daya saing UMKM dan industri kreatif melalui pembinaan standarisasi produk	
3.	Pembinaan tata kelola keuangan dan perpajakan untuk UMKM dan industri kreatif	

1	2	3
4.	Pembinaan dan penguatan diversifikasi produk dan desain produk bagi UMKM dan industri kreatif	• Psikologi • Agrobis • Teknik Mesin • Teknik Industri Teknik Informatika
5.	Pembinaan dan pendampingan dalam perlindungan hukum atas HaKI bagi UMKM dan industri kreatif	
6.	Penerapan model pelayanan dan perlindungan hukum bagi konsumen	
7.	Penerapan model pembelajaran bahasa Inggris untuk pelaku UMKM, untuk mengikuti tren pasar global	
8.	Pembinaan penggunaan TIK untuk mendukung tata kelola dan pengembangan pasar UMKM dan industri kreatif	
9.	Pembinaan pelaksanaan hubungan industrial, dan perlindungan tenaga kerja	
10.	Pembinaan perilaku dan manajerial pelaku UMKM dan industri kreatif	

Tabel 4.4 : Tema Unggulan Bidang Pembangunan Daerah dan Desa

No.	Tema-tema Unggulan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kompetensi Keilmuan
1	2	3
1.	*Capacity building* administatur desa/kelurahan dan kecamatan	• Ilmu Ekonomi • Manajemen • Akuntansi • Ilmu Adm. Publik • Ilmu Hukum • Sastra Inggris • Psikologi • Agrobis • Teknik Mesin • Teknik Industri
2.	*Capacity building* anggota BPD/LKMK dalam perumusan perencanaan pembangunan desa/kelurahan	
3.	Pelatihan analisis kebijakan pembangunan Daerah/desa/kelurahan	
4.	Pembinaan/pelatihan tata kelola keuangan dan akuntansi sektor publik tingkat desa/kelurahan	
5.	Pembinaan Manajemen bisnis untuk badan usaha desa	
6.	Penguatan *data base* potensi ekonomi desa, kecamatan, kabupaten/kota	
7.	Realisasi pembentukan kawasan sentra wisata kuliner khas Surabaya/ Jawa Timuran	
8.	Realisasi pembentukan kawasan perekonomian (pusat kerajinan, industri kreatif, wisata dan lainnya) berbasis potensi lokal	
9.	Realisasi pembentukan kawasan agrobis dan agro wisata berbasis muatan potensi lokal	
10.	Pembentukan dan penguatan sentra pemasaran kerajinan produk UMKM	
11.	Penerapan analisis kebijakan pulik (naskah akademik) untuk kebijakan daerah	

1	2	3
12.	Pembinaan SDM sektor publik dalam penguasaan dan pemanfaatan TIK guna mendukung penerapan *e-government*	
13.	Penerapan model pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah maupun swasta	
14.	Penguatan penggunaan TIK untuk mendukung sistem informasi dalam administrasi pembangunan (perencanaan dan manajemen pembangunan)	
15.	Penguatan pelaksanaan *public-private partnership* untuk mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat	

Tabel 4.5 : Tema Unggulan Bidang Pengentasan Kemiskinan

No.	Tema-tema Unggulan Pengabdian Kepada Masyarakat	Kompetensi Keilmuan
1	2	3
1.	Pengembangan *sosio enterpreneurship* untuk pengurangan kemiskinan	• Ilmu Ekonomi • Manajemen • Ilmu Adm. Publik • Ilmu Hukum
2.	Pengembangan dan penerapan model dan strategi pemberdayaan dalam pengurangan kemiskinan	
3.	Perumusan dan pengembangan kebijakan strategis untuk pengurangan kemiskinan	• Psikologi • Agrobis • Tehnik Industri
4.	Pelatihan daur ulang limbah untuk memberikan kapasitas produksi keluarga miskin	
5.	Pelatihan pembuatan kerajinan tangan memanfaatkan potensi lokal	
6.	Pembinaan dan pengembangan *urban farming*	
7.	Pelatihan dan pembinaan ketrampilan kerja untuk keluarga miskin	
8.	Penerapan dan penguatan manajemen lumbung (*stock* & *supplay*) pangan daerah rawan bencana	
9.	Rehabilitasi manajemen sektor publik pasca bencana	
10.	Rehabilitasi psikologis korban bencana	
11.	Pelatihan evakuasi untuk siswa sekolah	
12.	Pelatihan tanggap bencana untuk pemuda dan tokoh masyarakat	
13.	Pendidikan mitigasi bencana untuk siswa SD dan SMP	
14.	Sosialisasi/kegiatan aksi pemeliharaan lingkungan hidup untuk mengurangi resiko bencana	
15.	Analisis kebijakan mitigasi bencana	

1	2	3
16.	Penerapan manajemen dan distribusi logistik untuk korban bencana	
17.	Pelatihan *assestment* kerusakan dan korban bencana	
18.	Perlindungan hukum korban bencana dan asset korban bencana	
19.	Penerapan tenologi pertanian alternatif untuk produksi pertanian pasca bencana	
20.	Penerapan manajemen lingkungan daerah rawan bencana untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana	
21.	Penerapan rencana aksi kebijakan strategis manajemen bencana, dan kebijakan mitigasi dan rehabilitasi pasca bencana	

4.3. PENGUKURAN KINERJA

Keberhasilan kinerja penyelenggaraan PPM Universitas Wijaya Putra dilihat mulai dari proses implementasi sampai dengan efektivitasnya. Pengukuran kinerja PPM UWP dengan mengikuti 8 (delapan) standar nasional pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015), dengan komponen dan indikator masing-masing sebagai berikut :

Tabel 4.6. : Pengukuran Kinerja PPM

Standar / Komponen	Indikator
1. Standar Hasil PPM	
1) Teknologi Tepat Guna (TTG)	• Jumlah TTG yang dihasilkan • Jumlah penyelesaian masalah sosial/sasaran dari hasil penerapan TTG
2) Model / Prototype	Jumlah model/ prototype yang dihasilkan
3) Rekayasa Sosial	• Jumlah permasalahan sosial/sasaran yang dapat diupayakan penyelesaiannya • Dampak pada perubahan tata kehidupan kelompok sasaran • Dampak peningkatan derajat kehidupan masyarakat kelompok sasaran
4) Buku Ajar/Buku Teks (ISBN)	Jumlah buku ajar/buku teks yang dihasilkan (diterbitkan)
5) Publikasi Ilmiah	• Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional • Berkurangnya jumlah publikasi lokal
6) Pemakalah dalam forum ilmiah	• Jumlah pemakalah dalam forum ilmiah internasional • Jumlah pemakalah dalam forum ilmiah nasional
7) Tulisan dalam media massa	Jumlah tulisan media dalam media massa yang dihasilkan
8) Bahan Pelatihan	• Jumlah bahan pelatihan yang dihasilkan • Jumlah bahan pelatihan yang menjadi rujukan pihak lain
9) Unit Usaha	Peningkatan jumlah unit usaha kampus dari hasil PPM

Standar / Komponen	Indikator
10) Perolehan Paten dan HaKI	• Jumlah pengajuan hak paten dan HaKI • Jumlah hak paten dan HaKI yang diperoleh
2. Standar Isi PPM	
1) Penerapan hasil penelitian	• Peningkatan jumlah PPM penerapan hasil penelitian pengabdi yang bersangkutan secara langsung • Peningkatan jumlah PPM penerapan hasil penelitian (bukan pengabdi)
2) Pengembangan dan penerapan IPTEKS	• Jumlah PPM pengembangan IPTEKS • Jumlah PPM penerapan IPTEKS
3) Teknologi Tepat Guna (TTG)	Jumlah PPM penerapan TTG
4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial dan/atau rekomendasi kebijakan	• Jumlah PPM penerapan model pemecahan masalah atau rekayasa sosial • Jumlah PPM yang mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan • Jumlah PPM penerapan rekomendasi kebijakan yang diajukan
3. Standar Proses PPM	
1) Jumlah bidang keahlian yang terlibat PPM 2) (>2 bidang keilmuan)	• Peningkatan jumlah PPM kolaborasi lintas bidang keilmuan • Peningkatan jumlah bidang keilmuan dalam pelaksanaan satu PPM
3) Keterlibatan perguruan tinggi lain sebagai mitra	• Peningkatan jumlah pelaksanaan PPM UWP yang melibatkan (bidang keilmuan) perguruan tinggi mitra • Peningkatan jumlah (bidang keilmuan)perguruan tinggi mitra dalam pelaksanaan PPM UWP
4) Ketelibatan Pemda dan/atau sektor swasta (bisnis/industri)	• Peningkatan jumlah pelaksanaan PPM yang melibatkan kerjasama dengan (instansi jajaran) Pemda • Peningkatan jumlah pelaksanaan PPM yang melibatkan kerjasama dengan sektor swasta (bisnis/industri) • Peningkatan jumlah sektor swasta (bisnis/industri) yang terlibat dalam pelaksanaan PPM UWP
5) Kelompok sasaran penerima manfaat positif PPM	• Peningkatan jumlah kelompok sasaran terlibat aktif (berpartisipasi) dalam pelaksanaan PPM • Peningkatan kualitas partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan PPM • Peningkatan jumlah PPM yang dalam pelaksanaannya mampu melibatkan partisipasi kelompok sasaran
6) Monitoring dan Evaluasi (monev) Internal	• Adanya prosedur baku dalam pelaksanaan monev internal • Peningkatan kualitas review internal terhadap usulan pelaksanaan PPM • Penurunan jumlah usulan dan pelaksanaan PPM yang di luar progam dalam RENSTRA PPM • Peningkatan kualitas pelaksanaan monev internal • Adanya kesesuaian pelaksanaan PPM dengan jadwal dan prosedur baku pelaksanaan PPM
4. Standar Penilaian	
1) Jumlah modul pembelajaran	• Jumlah mondul pembelajaran yang dihasilkan pelaksanaan PPM • Jumlah mondul pembelajaran yang dirujuk pihak lain

Standar / Komponen	Indikator
2) Jumlah hasil PPM yang dimanfaatkan	• Jumlah hasil PPM yang dimanfaatkan oleh masyarakat/ PT lain (mitra)/Pemda/swasta • Jumlah kelompok masyarakat/ PT lain (mitra)/Pemda/ swasta yang memanfaatkan hasil PPM
3) Jumlah kelompok masyara-kat/institusi yang melanjutkan kerjasama	• Peningkatan jumlah kelompok masyarakat (mitra PPM) yang melanjutkan kerjasama • Peningkatan jumlah kelompok masyarakat (mitra baru PPM) yang mengajukan kerjasama baru • Peningkatan jumlah instansi Pemda/swasta yang bersedia melanjutkan/mengembangkan kerjasama
5. Standar Pelaksana	
1) SDM Pengabdi S3	• Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi S3 yang terlibat dalam PPM • Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi S3 yang menjadi ketua pelaksana PPM
2) SDM Pengabdi S2	Peningkatan jumlah dosen dengan kualifikasi S2 yang menjadi ketua pelaksana PPM
3) Pelaksana Pengabdian Mahasiswa	• Peningkatan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan PPM dosen • Berkembangnya PPM oleh mahasiswa di luar KKN
4) SDM Staf Pendukung	• Peningkatan jumlah tenaga administrasi/teknisi/laboran yang diperbantukan/terlibat dalam PPM • Peningkatan jumlah PPM yang melibatkan (mendapat bantuan) tenaga administrasi/teknisi/laboran
6. Standar Sarana dan Prasarana	
1) Fasilitas penunjang pelaksanaan PPM	• Peningkatan jumlah pusat studi/laboratorium yang dilibatkan dalam PPM • Berkembangnya pusat studi/laboratorium baru, yang dapat menjadi basis pelaksanaan PPM
2) Kelembagaan pelaksanaan PPM	• Tumbuh-kembangnya pelaksanaan PPM yang berbasis pada kegiatan pusat studi/laboratorium • Bertambahnya jumah dosen yang tergabung dalam pengelolaan pusat studi/laboratorium • Tumbuh-kembangnya inkubator bisnis • Peningkatan pemanfaatan inkubator bisnis oleh sivitas akademika dan masyarakat
3) Kelayakan fasilitas kantor	• Peningkatan jumlah ruang kantor untuk kegiatan PPM • Peningkatan fasilitas kantor pelaksana PPM • Peningkatan jumlah ruang rapat/seminar dan fasilitasnya
7. Standar Pengelolaan	
1) Kelembagaan penjaminan mutu dan SDM	• Adanya prosedur baku penjaminan mutu pengelolaan dan pelaksanaan PPM • Melembaganya penjaminan mutu pelaksanaan PPM melalui LPPM dan Badan Penjaminan Mutu UWP • Terwujudnya intrumen baku penjaminan mutu PPM • Pelibatan SDM pengabdi yang berpengalaman dalam pengelolaan penjaminan mutu PPM UWP
2) Rekruitmen reviewer internal	• Pelembagaan persyaratan dan prosedur baku rekuitment reviewer internal • Peningkatan dosen UWP yang memenuhi persyaratan sebagai reviewer internal

Standar / Komponen	Indikator
3) Desk evaluasi proposal	• Semakin melembaganya pelaksanaan desk evaluasi proposal PPM dari internal UWP • Peningkatan jumlah proposal PPM yang melalui desk evaluasi internal
4) Penetapan pemenang	Adanya seleksi/desk evaluasi dalam penentuan pemenang PPM pendanaan internal
5) Kontrak pengabdian	Adanya kontrak pelaksanaan PPM antara pemenang PPM internal dengan UWP melalui LPPM UWP
6) Monitoring dan evaluasi internal	• Pelaksanaan monev internal melembaga dan baku dituangkan dalam prosedur baku PPM UWP • Pelaksanaan monev internal mulai dari awal pelaksanan, selama proses dan sampai selesainya pelakasanaan PPM • Pelaksanaan kunjungan lapangan oleh Tim monev/ penjaminan mutu secara rutin/terjadwal
7) Seminar hasil PPM internal	• Terlaksananya seminar hasil semua PPM internal • Terjadwalnya pelaksanaan seminar hasil PPM internal
8) Pelaporan hasil PPM	• Peningkatan kontrol terhadap penyelesaian laporan • Penyelesaian laporan hasil tepat waktu sesuai kontrak
9) Tindak lanjut hasil PPM	• Dipublikasikannya semua hasil PPM pada jurnal ilmiah • Pengajuan/pengurusan HaKI hasil pelaksanaan PPM • Pengembangan penerapan TTG yang dihasilkan PPM
10) Kegiatan pelatihan	• Semakin melembaganya pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal PPM • Peningkatan jumlah dosen yang terlibat sebagai peserta pelatihan penyusunan proposal PPM • Peningkatan jumlah nara sumber pakar dalam pelatihan pepenyusunan proposal PPM • Berkembangnya keterlibatan mahasiswa dalam pelatihan perencanaan dan pelaksanaan PPM
11) Sistem penghargaan	• Peningkatan kualitas penghargaan kepada sivitas akademika pengabdi yang berhasil melaksanakan PPM • Peningkatan pelembagaan penghargaan
12) Website	• Peningkatan kualitas isi dan informasi website LPPM • Peningkatan kecepatan *updating* informasi dan isi website LPPM untuk menjamin kebaharuan • Terwujudnya website LPPM sebagai media penyebaran informasi bagi/dan komunikasi LPPM dengan sivitas akademika dan masyarakat
8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan	
1) Jumlah judul PPM yang dilaksanakan	• Peningkatan jumlah judul PPM program Dikti secara keseluruhan • Peningkatan jumlah judul skema PPM program Dikti multi tahun
2) Jumlah dana PPM program Dikti	• Peningkatan jumlah dana pembiyaan PPM program Dikti multi tahun secara keseluruhan • Peningkatan jumlah dana dari program Dikti untuk skema PPM multi tahun
3) Jumlah dana internal UWP	• Peningkatan jumlah skema PPM pembiayaan dana UWP • Peningkatan jumlah dana internal pembiayaan PPM • Peningkatan alokasi dana anggaran UWP untuk pembiyaan pengelolaan PPM

Standar / Komponen	Indikator
4) Jumlah dana sumber lainnya	• Peningkatan jumlah skema PPM pembiayaan kerjasama dengan instansi Pemda • Peningkatan jumlah dana PPM pembiayaan kerjasama dengan instansi Pemda • Berkembangnya kerjasama pembiayaan PPM kerjasama dengan sektor swasta dan CSR • Berkembangnya partisipasi masyarakat kelompok sasaran dalam pembiayaan pelaksanaan PPM

BAB 5 IMPLEMENTASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI

5.1. IMPLEMENTASI

Realisasi kinerja dan efektivitas dari Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) ini sangat bergantung pada bagaimana implementasinya lebih lanjut. Implementasi RENSTRA PPM dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan partisipasi semua unsur di lingkungan Universitas Wijaya Putra terkait dengan pelaksanaan PPM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Implementasi RENSTRA PPM membutuhkan program operasional lebih lanjut dari setiap unit kerja sampai dengan *road-map* PPM masing-masing dosen pengabdi. Program operasional PPM termaksud, adalah progam PP unit kerja yang pada dasarnya merupakan turuan dari RENSTRA PPM. Terdapat beberapa tahap dalam penyusunan program operasional PPM untuk implementasi RENSTRA PPM ini, yaitu:

1. Penyusunan rencana program PPM Fakultas, dengan lingkup dan cakupan sesuai dengan rumpun keilmuan (program studi) yang dikelola masing-masing fakultas. Rencana program PPM Fakultas, mengkamodir pula adanya pusat studi atau labaratorium di lingkungan masing-masing.
2. Penyusunan rencana program PPM Program Studi, sesuai keilmuan masing-masing dan bidang keahlian para dosen pada program studi yang bersangkutan. Pada tingkat program studi. Rencana program PPM pada tingkat program studi, harus memuat *road-map* PPM program studi yang jelas dan operasional.
3. Penyusunan rencana dan *road-map* PPM pada pusat studi atau laboratorium sesuai bidang keilmuan/kajian masing-masing. Apabila pusat studi atau laboratorium belum mampu menyusun rencana dan *road-map* PPM, maka yang digunakan adalah rencana dan *road-map* PPM program studi.

4. Selanjutnya, sesuai rencana dan *road-map* PPM program studi dan/atau pusat studi atau laboratorium dimana dosen yang bersangkutan bergabung menjadi pengelola atau tenaga ahli, masing-masing dosen menyusun *road-map* PPM sesuai dengan bidang keahlian dan *road-map* penelitiannya.

Dengan demikian, ke depan penyusunan dan pengajuan proposal PPM masing-masing dosen akan sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam RENSTRA PPM UWP ini, baik kesesuaiannya dengan tema payung PPM serta hasil kajian dalam penelitian dosen yang bersangkutan. Namun demikian apabila terdapat pengajuan rencana PPM di luar yang diprogramkan dalam RENSTRA PPM, masih dimungkinkan untuk diakomodir, dengan ketentuan:

1. Pengajuan rencana PPM termaksud karena atas permintaan atau program PPM kerjasama dengan instansi Pemerintah Daerah atau sektor swasta yang membiayai pelaksanaan PPM.
2. Pengajuan rencana PPM oleh dosen, dan apabila telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, maka pelaksanaannya dibiayai dari dana internal UWP.

5.2. SUMBER PEMBIAYAAN

Bahwa salah satu aspek penting agar kegiatan PMM dan KKN dapat terlaksana dengan baik, lancar dan berkelanjutan adalah adanya jaminan pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan PPM dan KKN yang disusun sesuai dengan tema dan program dalam RENSTRA PPM ini, pembiayaannya direncanakan berasal dari:

(1) Dana desentralisasi program hibah pengabdian kepada masyarakat Kementerian Ristekdikti. Pembiayaan dari program hibah ini berkaitan dengan peningkatan kualitas evaluasi kinerja PPM UWP, untuk itu senantiasa diupayakan peningkatan kapabilitas para pengabdi dan kualitas PPM (mulai dari kualitas proposal, pelaksanaan sampai dengan *output* dan *outcome*-nya), peningkatan kuantitas program, serta peningkatan skema program PPM.

(2) Pembiayaan internal UWP, alokasi dana PPM dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UWP

(3) Kerjasama dengan jajaran instansi Pemerintah Pusat (selain Kemenristekdikti) dan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota). Untuk itu akan dikembangkan lebih lanjut jejaring dan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota, dalam hal ini juga akan dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi program PpM UWP dengan berbagai program dari Pemerintah Daerah.

(4) Pemanfaatkan dan/atau kerjasama dengan pelaksanaan program *corporate social responsibility* (CSR). Untuk itu diperlukan perluasan jejaring kemitraan dan kerjsama dengan berbagai korporasi (termasuk BUMN/D) di kawasan Surabaya dan sekitarnya pada khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya. Selain itu pengembangan program PPM dan KKN yang sesuai dengan program CSR namun tetap mengacu pada RENSTRA PPM ini.

(5) Menggalang sumber-sumber lainnya yang potensial dan tidak mengikat.

Rencana sumber pembiayaan tersebut, diarahkan untuk adanya sumber-sumber pembiayaan alternatif dan meminimalkan ketergantungan pembiayaan dari sumber pembiayaan tertentu. Adapun perkembangan prosentase pembiayaan PPM dari masing-masing sumber direncanakan sebagai berikut :

Tabel 5.1 : Rencana Prosentase Sumber Pembiayaan PPM

No.	Sumber Pembiayaan	Prosentase Pembiayaan					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kemenristekdikti	90	80	70	60	50	40
2.	Pemerintah Daerah	--	5	10	10	15	20
3.	Sektor Bisnis/Korporasi (CSR)	--	5	10	15	20	25
4.	Universitas Wijaya Putra	10	10	5	5	5	5
5.	Sumber lainnya	--	--	5	10	10	10

Untuk pelaksanaan kegiatan PPM dengan pembiayaan yang bersumber dari program hibah Kemenristekdikti, direncanakan ada perkembangan baik dari jumlah judul, variasi dan jumlah skema, serta jumlah dana yang dapat diserap. Rencana perkembangan perolehan hibah PPM dengan pembiayaan yang bersumber dari program hibah Kemenristekdikti, diharapkan dapat sesuai tabel 5.2 di bawah.

Tabel 5.2. : Proyeksi Perolehan Hibah PPM s/d 2021

Tahun	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Skema	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah	∑ Judul	∑ Dana Hibah
IbM	9	353.000.000	13	562.900.000	20	800.000.000	25	1.000.000.000	30	1.200.000.000	35	1.400.000.000	40	1.600.000.000
IbK			0	-	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000	4	400.000.000
IbPE	1	100.000.000	1	100.000.000	2	300.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	6	900.000.000
IbPUD			0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000
IbKIK	4	550.000.000	5	805.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	4	700.000.000	5	875.000.000	6	1.050.000.000
IbW	1	90.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
IbW PT - CSR/Pemda	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	2	200.000.000	3	300.000.000
IbDM	0	-	0	-	1	125.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	5	625.000.000
HI-LINK	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000
KKN-PPM	0	-	1	60.000.000	0	-	2	200.000.000	3	300.000.000	5	500.000.000	6	600.000.000
Jumlah	15	1.093.000.000	21	1.617.900.000	29	2.125.000.000	42	3.300.000.000	51	3.950.000.000	64	5.025.000.000	76	6.075.000.000

5.3. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Guna menjamin terlaksananya kegiatan PPM dan KKN yang berkualitas dan efektif dalam pencapaian *output* dan *outcome*-nya diperlukan sistem penjaminan mutu melalui mekanisme pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi yang komprehensif, mulai dari unit terkait yang terkecil sampai dengan tingkat Universitas. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan mulai dari penyusunan dan pengajuan proposal kegiatan, kesepakatan kontrak kerja PPM, pelaksanaan kegiatan PPM di lapangan sampai dengan penyelesaian pelaporan akhir. Kepada para dosen akan selalu diberikan pencerahan melalui kegiatan workshop penyusunan proposal, guna *updating* informasi dan standar/skema program PPM dan KKN. Terhadap semua proposal dilakukan *review* guna menjamin kualitas dan kelayakannya.

Agar proses pelaksanaan berlangsung secara baik dan sesusi dengan ketentuan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap proses pelaksanaan PPM dan KKN dengan *site visit* ke lapangan, serta pemantauan terhadap ketertiban pelaporan secara administratif, mulai dari awal kegiatan sampai dengan laporan akhir. Kegiatan monev, selain untuk menjamin kelancaran dan kualitas proses pelaksanaan, juga dalam rangka untuk menjamin pencapaian hasil sesuai dengan tujuan, target dan sasaran masing-masing kegiatan PPM dan KKN. Agar pelaksanaan monev memiliki standar baku dalam penilaian, lebih lanjut akan dikembangkan instrumen penilaian yang berdasar pada instrumen pengukuran kinerja sebagaimana telah dituangkan dalam RENSTRA PPM ini. Guna mewujudkan sistem penjaminan mutu yang baik yang mampu menjamin pencapian kualitas proses dan hasil PPM dan KKN, lebih lanjut Prosedur baku (*Standar Operating Procedure* = SOP) PPM dan KKN akan diperbaharui dan disempurnakan.

5.4. DISEMINASI HASIL

Bahwa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PPM) perlu adanya keberlanjutan agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial dan memberikan kemanfaatan secara komprehensif, baik pada kelompok sasaran maupun pada masyarakat secara luas. Keberlanjutan pelaksanaan suatu PPM tidak hanya terbatas pada kelompok sasaran PPM yang bersangkutan saja, namun hasil dari suatu pelaksanaan PPM tersebut perlu diterapkan pada masyarakat secara luas, untuk mendukung penyelesaian permasalahan sosial yang relatif sama di tempat dan waktu yang berbeda. Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan PPM harus dapat dirujuk dan terapkan oleh

siapapun dan dimanapun, karena itu diperlukan adanya diseminasi kepada khalayak luas, baik secara ilmiah maupun secara populer, serta mendokumen-kannya secara baik. Berkenaan dengan hal itu, diseminasi hasil-hasil pelaksanaan PPM akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Diseminasi secara akademis melalui forum ilmiah

   Diseminasi secara akademis, cenderung dilakukan untuk kalangan akademisi yang dilakukan dalam forum-forum ilmiah, dimana melalui forum ilmiah itu dilakukan pembahasan dan kritik secara ilmiah. Diseminasi secara akademis akan dilakukan melalui :

   a. Mempresentasikan dalam forum seminar ilmiah, yang dikhususkan untuk pembahasan hasil-hasil pelaksanaan PPM, baik pada forum lokal, regonal, nasional dan apabila memungkinkan dalam forum semiar internasional.
   b. Publikasi (artikel) hasil pelaksanaan PPM melalui jurnal ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional.

2. Diseminasi secara populer

   Pelaksanaan diseminasi hasil PPM secara populer, ditujukan untuk kalangan masyarakat secara umum, dilakukan dengan :

   a. Publikasi melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik
   b. Publikasi melalui *website* UWP
   c. Publikasi melalui forum-forum kegiatan kampus, baik yang melibatkan internal sivitas akademika maupun yang melibatkan masyarakat di luas kampus

3. Dokumentasi hasil melalui repository

   Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian melalui *repository*, baik dalam bentuk manuskrip, foto maupun video, akan sangat membantu diseminasi hasil PPM secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Melalui *repository* semua dokumen hasil pelaksanaan PPM dapat diakses sewaktu-waktu sesuai dengan waktu kapan dibutuhkan.

BAB 6 PENUTUP

Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSTRA PPM) yang telah tersusun secara komprehensif ini benar-benar dapat memberikan arah kebijakan dan pedoman bagi semua pihak di lingkungan Universitas Wijaya Putra dalam mengembangkan dan melaksanaan PPM. Keberhasilan dalam realisasi, implementasi dan efektivitasnya sangat ditentukan oleh semangat dan kerjasama semua pihak dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan PPM dan KKN. Konsistensi para pengabdi, dan semua pihak yang terkait, untuk mengikuti semua ketentuan yang telah digariskan dalam RENSTRA PPM ini merupakan salah satu faktor penting tujuan dan sasaran RENSTRA PPM dapat tercapai.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor Universitas Wijaya Putra, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Wakil Rektor Bidang Pengembangan Sumberdaya, Bapak dan Ibu para Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana, Bapk dan Ibu para Ketua Program Studi Stara 1 dan Strata 2, serta semua pihak yang telah berkenan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penyusunan RENSTRA PPM ini.

Semoga RENSTRA PPM ini dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, dapat memberikan arah bagi pengembangan kebijakan di UWP dalam penyeleng-garaan dharma pengabdian kepada masyarakat, serta benar-benar menjadi pedoman sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sampai dengan tahun 2021. Diharapkan pula, kepada semua pihak yang berkepentingan, baik internal UWP maupun eksternal UWP, bekenan memberikan dukungan agar RENSTRA PPM ini dapat dilaksanakan dan semua upaya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan PPM dan KKN di UWP dapat berjalan dan tercapai sesuai harapan. Amin.

DAFTAR REFRENSI

- Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Rencana Strategis Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019
- Ditlitabmas Dikti, *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*, Edisi IX, 2013.
- Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Pedoman Penyusunan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi, 2016
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019,
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021
- Statuta Universitas Wijaya Putra Tahun 2014-2019
- Rencana Strategis Universitas Wijaya Putra Tahun 2014-2019
- Rencana Induk Penelitian Universitas Wijaya Putra Tahun 2015 - 2019